

GLOBALISASI DAN PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Clariza Miranda

UIN Sunan Ampel Surabaya

Frensia Yuliandra Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abid Rohman

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Pada masa pertumbuhan globalisasi sekarang hubungan keterkaitan negara semakin mudah dan lebih cepat. Globalisasi sendiri merupakan sebuah tahapan yang akan menjadikan dunia dalam kesatuan yang sama dengan tidak adanya batas oleh garis dan masyarakat melalui garis geografi pada kedaulatan negara. Dengan dunia yang akan melalui tahapan ini menjadikan globalisasi dapat tidak terbatas dalam suatu kedaulatan negara dan negara akan menjadi terhubung dengan sangata luas yang telah mendapatkan dukungan melalui pertumbuhan komunikasi seperti, internet, media cetak dan elektronik. Artikel ini menjawab masalah bagaimana pencegahan peredaran narkoba di Jawa Timur pada era globalisasi dewasa ini. Dalam lajunya globalisasi muncullah yang disebut kejahatan lintas batas negara, dimana kejahatan transnasional antara lain seperti, perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan obat-obatan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Karena pertumbuhan globalisasi yang laju Indonesia menjadi negara yang terlibat dengan banyak mempunyai kasus tentang persebaran narkoba, dimana Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis. Dengan ini memudahkan untuk transaksi jual beli narkoba. Negara-negara di dunia juga beberapa minim pertahanan dan keamanannya dan itu yang membuat para mafia dengan gampang mendistribusikan narkoba. Maka dari itu sebaiknya mulai dari individu untuk memerangi penyebaran narkoba, agar generasi yang aka datang tidak buruk. BNN juga menjadi salah satu instansi yang berperan baik dalam memberantas narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Kejahatan Lintas Batas Negara, Narkoba, Indonesia, Globalisasi, BNN

PENDAHULUAN

Globalisasi jika diibaratkan yaitu memiliki dua ruang sisi yang berkebalikan, karena tidak hanya membagikan pengaruh positif saja, melainkan dengan meninggalkan dampak negatif yang sangat sulit untuk dihindari. Pengaruh negatif globalisasi juga menanggalkan efek yang sangat luas bagi sebuah negara. Pengaruh yang dapat terlihat adalah dapat memberikan efek bagi suatu negara diberbagai aspek kehidupan masyarakat karena memudarnya batas teritorial suatu negara.¹ Dengan tidak adanya kedaulatan negara, pengaruh krisis tersebut dapat menjadi dampak bagi negara lain dengan sangat cepat karena globalisasi menjadikan negara saling ketergantungan. Karena pelaku kejahatan era ini tidak terbatas kedaulatan negara maupun batas yurisdiksi, mereka dapat menjalankan melintasi batas negara dengan mudahnya.²

Globalisasi adalah sebuah tahap dalam menjadikan dunia dalam kesatuan dengan tanpa batasan oleh garis dan batas geografis suatu kedaulatan negara, dengan melewati tahapan ini dunia tidak akan memiliki batasan dan negara akan tidak memiliki batas teritorial mereka sehingga dapat dengan mudah masyarakat melakukan bepergian ke negara lain serta dipengaruhi globalisasi dalam komunikasi seperti internet, media cetak, dan elektronik. Pertumbuhan pada era ini memberikan interaksi sesama manusia menjadi lebih cepat dan dalam tempo yang singkat. Secara keseluruhan, globalisasi menggambarkan aspek ekonomi yang begitu dibutuhkan, yang dapat di definisikan bahwa aspek ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting pada masa globalisasi saat ini dan sangat memiliki pengaruh besar pada politik, ideologi negara, social dan budaya, keamanan dan pertahanan dalam satu negara. Percepatan arus globalisasi, dapat memberikan dampak negatif yang memberikan tantangan modern bagi setiap negara di dunia terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat kasus kejahatan yang melewati wilayah negara lain atau kejahatan transnasional, dimana kejahatan transnasional antara lain seperti, perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan obat-obatan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Karena lemahnya pertahanan dan perbatasan di suatu negara membuat kejahatan transnasional dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.³

¹ Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Indonesia: Majalah Interpol, 2007), hlm. 58

² Ibid

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, (Jakarta: BPFKUL, 1991), hal 15

Selain globalisasi, migrasi atau perpindahan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat maju merupakan hal yang dapat menunjang peningkatan kejahatan transnasional.⁴ Karena kemajuan teknologi membuat hubungan antar bangsa, antar masyarakat, maupun antar individu menjadi semakin dekat. Dengan terbentuknya suatu dunia yang baru dengan tanpa batas atau *bordereless world*. Perpindahan yang melintasi batas negara akan menyebabkan masalah modern bagi negara-negara di dunia atau biasa disebut transnasional. Karena kenyataannya kejahatan transnasional akan membludak ke berbagai negara di dunia.

Salah satu bukti dari kejahatan transnasional yang paling kritis dengan berkaitan dengan masa depan suatu negara terhadap generasi suatu bangsa, terutama kelompok generasi penerus dunia ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba.⁵ Bisnis narkoba saat ini meluas hingga ke seluruh dunia, dan semakin terbiasa dengan perjalanan mafia narkoba. Semakin akrab dengan petualangan mafia saat ini melakukan perabahan ke segala tiap bagian bumi. Semakin terbiasa untuk melakukan perjalanan mafia narkoba. Masyarakat dunia telah menyadari, bisnis narkoba dapat menjadi sebuah ancaman yang sangat parah bagi seluruh dunia dengan kejahatan yang telah masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir dan telah mempengaruhi dengan perkembangan yang melewati batas negara.⁶ Penanganannya perlu membutuhkan abdi negara yang memiliki ketekunan dengan melibatkan abdi negara yang dapat melakukan kerjasama dalam membangun jaringan nasional maupun internasional

Perdagangan narkoba pada dasarnya tidak semudah itu dijalankan, harus ada beberapa orang yang bersedia berperan dalam mensukseskan perdagangan narkoba tersebut.⁷ Dengan adanya kartel-kartel besar pengedar narkoba di seluruh dunia dengan gampang mendistribusikannya. Selain itu adanya perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak sindikat pengedar narkoba ini lebih cepat dan mudah untuk melancarkan aksinya. Asia merupakan jalur yang strategis untuk melakukan pengedaran narkoba.⁸ Asia

⁴ Ibid

⁵ JohnBroome. 2000. *Transnational Crime in The TwentyFirstCentury*

⁶ Mely Cabalero-Anthony, 2009, "*Challenging change: Non Traditional Security, Democracy and Regionalism*" dalam Donald K Emerson Hard Choices: *Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS Publishing, Singapura. hal. 193-194

⁷ Op.cit

⁸ Ibid

Tenggara dipergunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Sebanyak 49% dari peredaran narkoba internasional saat ini diserap oleh pasar Asia Tenggara yang diketahui dari negara-negara pemasok seperti Malaysia, China, India, Iran dan Belanda. Indonesia berada di posisi strategis dan merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN akan mendapatkan tantangan tersendiri untuk Indonesia agar dapat mengurangi peredaran narkoba

Sejatinya untuk memberantas adanya peredaran narkoba di dunia telah dibentuk sebagai salah satu mekanisme dalam kerjasama multilateral dengan memiliki perjanjian internasional yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang mana UNTOC sendiri diharapkan dapat dijadikan pedoman awal bagi seluruh negara dalam upaya penanggulangan kejahatan melewati batas negara atau transnasional.⁹

Berdasarkan data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2015, terjadi tren peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di tahun 2015 dan terjadi trend peningkatan lagi yaitu pada kasus narkoba dengan persentase kenaikan 26,9% dari 28.588 kasus di tahun 2015 menjadi 36.279 kasus di tahun 2016.¹⁰ Namun, meskipun jumlah tersangka dan kasus narkoba di Indonesia secara umum terus meningkat, data kasus peredaran narkoba oleh pengedar asing yang dapat dilihat berdasarkan jumlah tersangka yang terlibat tindak pidana narkoba di Indonesia justru mengalami penurunan. Data di lapangan menunjukkan berdasarkan kewarganegaraan jumlah tersangka yang terlibat tindak pidana narkoba yang terbanyak masih berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan jumlah tersangka yang berasal dari warga negara asing terus menurun yakni pada tahun 2014 sebanyak 195 WNA kemudian tahun 2015 sebanyak 174 WNA dan pada tahun 2016 sebanyak 165 WNA.¹¹

⁹ Kementerian Luar Negeri, "Kejahatan Lintas Negara", Kementerian Luar Negeri, 2019

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara Diakses pada tanggal 02

Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁰ Jurnal P4GN BNN Tahun 2014-2016

¹¹ Ibid

Dari data tersebut terlihat bahwa adanya perkembangan globalisasi dapat memudahkan jaringan pengedar narkoba untuk memperlancar aksinya diberbagai wilayah di Indonesia khususnya Jawa Timur. Karena Jawa Timur merupakan provinsi yang cukup besar yang ada di Jawa, selain itu Jawa Timur jga memiliki ibu kota terbesar kedua setelah Jakarta yaitu Surabaya. Di wilayah Jawa Timur menjadi pusat perindustrian serta menjadi provinsi yang memiliki arus perekonomian yang cukup tinggi karena ditempati oleh banyak perusahaan yang berkompeten serta memiliki arus mobilitas yang tinggi, maka dari itu dengan adanya tingkat kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba yang meningkat.

Kajian Terdahulu

Hervina Puspitasari, S.H., M.H. “Globalisasi Peredaran Narkoba”. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan keterkaitan antara globalisasi dengan peredaran narkoba yang bermula mengenai sejarah awal narkoba dikenal pada tahun 2000 sebelum masehi kemudian perkembangan narkoba dapat dikenal masyarakat. Hingga narkoba mulai masuk ke Indonesia yang berawal pada Indonesia hanya negara sebagai jalur peredaran narkoba dengan lokasi yang dimiliki cukup strategis tetapi semakin lama Indonesia telah mengenal narkoba sehingga menyebabkan Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pemasaran narkoba dan memberikan keuntungan yang banyak. Dengan dukungan letak geografis Indonesia yang cukup startegis sehingga makin mudah peredaran narkoba di Indonesia. Penulis juga menjelaskan dampak di era globalisasi terhadap transportasi yang berkembang dan kemajuan industri pariwisata yang berpengaruh terhadap pertumbuhan narkoba di Indonesia melalui berbagai jalur.

Tetapi, penulis dan peneliti memiliki perbedaan terhadap fokus yang dilakukan oleh penulis dan peneliti. Penulis menjelaskan jalur yang digunakan untuk melakukan peredaran narkoba dengan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia di berbagai jalur yang telah melewati batas negara dan kurangnya perhatian pemerintah untuk sarana prasarana di wilayah perbatasan serta perekonomian juga berpengaruh terhadap warga negara di wilayah perbatasan untuk tetap dapat menyambung kehidupan mereka. Dan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada globalisasi yang telah mempengaruhi segala aspek kehidupan sehingga orang-orang yang telah menjadi tersangka narkoba dapat tetap

berhubungan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Serta pengaruh globalisasi juga meningkatkan peredaran narkoba dan saat ini Indonesia menjadi surga bagi narkoba karena Indonesia sangat memiliki potensial tersebut. Peneliti juga menjelaskan mengenai konsep *human security* terhadap bahayanya peredaran narkoba pada masyarakat luas.

Novi Azmi “Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkoba di Asia Tenggara Tahun 2011- 2015”. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan sejarah masuknya narkoba ke wilayah Asia Tenggara serta bagaimana potensi yang dimiliki globalisasi untuk mengedarkan narkoba yang dianggap sebagai pasar yang menguntungkan dengan kawasan regional Asia Tenggara atau ASEAN memiliki *golden triangle* (Thailand, Myanmar, Laos) sebagai penghasil opium terbesar.

Perbedaan yang dimiliki penulis dan peneliti adalah bahwa penulis menjelaskan keterkaitan yang erat terhadap pengaruh globalisasi terhadap peredaran narkoba di ASEAN dengan memiliki rentang tahun 2011- 2015 yang didukung pengaruh globalisasi terhadap kemajuan teknologi dan informasi, kemajuan transportasi kemudahan dalam melewati batas negara sehingga batas negara semakin pudar seiring perkembangan globalisasi yang semakin meningkat. Dalam globalisasi ini dimanfaatkan oleh siapapun termasuk sindikat bahkan bandar narkoba yang semakin tidak mengenal batas negara. Perbedaan yang dimiliki oleh peneliti adalah peneliti memiliki fokus pada suatu wilayah tertentu yaitu Jawa Timur serta dijelaskan mengenai kasus dan peran yang digunakan dalam instansi pemerintah yaitu BNN Provinsi Jawa Timur melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk mencegah peningkatan kasus narkoba di Indonesia terkhusus wilayah Jawa Timur.

Cristina Elena Petcu “*Globalization and Drug Trafficking*”. Melalui karya tulis ini penulis menjelaskan mengenai pertumbuhan tanaman kokain yang berpusat di Kolombia yang dapat diperdagangkan di wilayah Amerika Serikat. Selain itu, penjualan kokain sangat menguntungkan bagi petani. Penulis menjelaskan dengan adanya pengaruh globalisasi distribusi kokain ke Eropa cukup meningkat selain itu jaringan semakin luas. Tapi disisi lain, dampak dari distribusi kokain adalah adanya *money laundering*, korupsi yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah negara.

Sedangkan, peneliti dalam karya ilmiah ini menjelaskan tentang hubungan antara globalisasi dan pengaruhnya terhadap kemajuan komunikasi yang dapat terus terhubung

dengan para sindikat atau bandar narkoba dan pengedar narkoba melalui alat teknologi komunikasi dari hal tersebut diiringi dengan penjelasan *human security* karena narkoba dapat mengancam kehidupan manusia dengan adanya peredaran narkoba tersebut. Serta, peneliti berfokus pada peningkatan peredaran narkoba setiap tahunnya di Jawa Timur dan pengaruhnya terhadap globalisasi dengan berbagai jalur dari distribusi narkoba melalui beberapa negara dengan transportasi yang digunakan. Dengan begitu transportasi, alat komunikasi adalah dampak positif tetapi dapat memberikan dampak negatif ketika kemajuan transportasi dan alat komunikasi digunakan sebagai peredaran narkoba

Globalisasi dan Kasus Narkoba di Indonesia

Globalisasi merupakan suatu istilah yang sangat populer digunakan hingga saat ini. Globalisasi ditandai dengan adanya fenomena perkembangan dunia yang mempengaruhi peradaban dunia yang semakin maju. Globalisasi ini banyak ditandai dengan mengenal teknologi dan informasi serta komunikasi yang semakin maju dimana globalisasi ini membawa peradaban manusia ke dalam lingkungan baru yang membuat manusia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pendukung kehidupan manusia yang semakin maju. Globalisasi ini memberikan dampak positif kepada kehidupan manusia dengan segala penemuan- penemuan yang mampu berkontribusi bagi kehidupan bahkan bagi negara. Selain itu, globalisasi juga membawa dampak negatif pada kehidupan manusia yang dapat masuk ke segala aspek kehidupan manusia. Dampak negatif menjadi tantangan tersendiri serta harus dapat diselesaikan dengan baik. Dampak negatif ini tidak dimiliki pada suatu negara. Tetapi, seluruh bangsa terkena pengaruh buruk tersebut. Dampak negatif yang berkembang adalah kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan dengan menerobos batas negara sehingga banyak korban dari negara lain atas kejahatan tersebut. Kemajuan kejahatan transnasional yang semakin menjadi ancaman bagi setiap negara dengan dipengaruhi globalisasi yang telah masuk ke segala aspek kehidupan manusia sehingga kejahatan transnasional dapat berkembang dengan cepat. Globalisasi juga telah menghapus batas-batas kedaulatan negara dengan perkembangan teknologi transportasi sehingga manusia atau seseorang dapat berpindah tempat atau ke negara lain hanya dengan waktu yang

singkat melalui perkembangan transportasi, udara, darat serta laut sehingga banyak kejadian kejahatan transnasional telah masuk ke negara lain dan bersifat transparan. Bersifat transparan yang memiliki arti tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan transnasional tidak terlihat atau tidak diketahui terutama oleh pihak berwenang sebuah negara dikarenakan kemajuan teknologi sehingga komunikasi dan transaksi dapat diketahui hanya oleh pelaku dan korban dari kejahatan transnasional tersebut.

Menurut PBB melalui sidangnya di Kairo, Mesir, pada bulan April 1995 mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fund, computer crime, environmental crime, trafficking in person, trade in human body parts, illicit drugs trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials*. Sementara itu pada tahun 1997, dalam deklarasinya di Manila, Filipina, ASEAN sepakat menggolongkan kejahatan transnasional berupa: pencucian uang, terorisme, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia dan pembajakan.¹² Perdagangan ilegal narkoba memberikan masalah serius dan dilalui oleh anggota negara ASEAN tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia sebagai anggota negara dari PBB serta ASEAN merupakan negara yang sangat luas dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah serta berada dalam posisi strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan negara yang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Dari pengaruh globalisasi tersebut Indonesia mendapatkan dampak positif bagi kemajuan serta perkembangan Indonesia. Disisi lain, Indonesia juga mendapatkan dampak negatif dari globalisasi yaitu kejahatan transnasional atau *Transnasional Organized Crime (TOC)* terutama narkoba. Narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang telah beredar di berbagai negara dan menjadi ancaman tidak terkecuali di Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia memiliki beberapa alasan bahwa selalu terjadi peningkatan kasus narkoba di Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat strategis serta kepadatan penduduk yang dimiliki Indonesia sehingga memberikan

¹² Muhamad Victor Simela. 2015. Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat (*Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands and West Kalimantan*), h 45

peluang sekaligus keuntungan yang besar bagi sindikat dan bandar atau mafia narkoba.

Berdasarkan hasil temuan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, mengungkapkan mengenai kasus narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yang semula 17.539 kasus dengan 23.000 tersangka pada tahun 2013, meningkat menjadi 18.788 kasus dengan 25.151 tersangka pada tahun 2014. Untuk barang bukti yang berhasil disita sepanjang tahun 2014 adalah ganja (56,4 ton, meningkat 260,39 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 15,56 ton), heroin (3,23 kg), hasis (4,3 kg), kokain (35, 63 gram), sabu (611, 26 kg), serta ekstasi (402.863 butir). Selain itu, sebanyak 126 warga negara asing (WNA) berhasil diamankan karena terbukti menjadi penyuplai barang-barang haram tersebut (meningkat dari yang semula 102 WNA pada tahun 2013). BNN mencatat sekitar Rp 30 sampai dengan Rp 40 triliun dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia setiap tahunnya.¹³ Dapat dilihat bahwa peningkatan permintaan narkoba dari Indonesia terus mengalami kenaikan. Sehingga para pengedar lepas (kurir) mendapatkan keuntungan finansial yang menggiurkan. Selain itu, para sindikat atau bandar narkoba menjadikan Indonesia pasar yang menguntungkan bagi mereka untuk menjual narkoba karena permintaan yang besar serta lokasi Indonesia yang strategis.

Kemudian pemakai narkoba di wilayah Indonesia dapat diasumsikan sebesar 3,7 juta orang pada tahun 2019. Selama tahun 2020, telah diungkap 41.896 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 51.166 tersangka. Sedangkan, pada triwulan pertama 2021, ditemukan 12.890 kasus narkoba dengan 16.740 tersangka. Berbagai barang bukti kemudian dimusnahkan. Pada 25 Mei 2021, BNN memusnahkan barang bukti yang kelima kalinya pada tahun 2021 berupa 794,62 kilogram sabu, 19.675 butir ekstasi, dan 22,33 kilogram ganja yang merupakan hasil pelecakan untuk kasus pada Maret-April 2021. Hingga Mei, total barang bukti yang telah dimusnahkan mencapai 1,5 ton. Sebelumnya pada 25 Maret 2021, BNN berhasil mengekspos enam jaringan yang dua diantaranya mendapatkan perintah oleh narapidana warga binaan di lapas Jawa Barat, Aceh, dan Banjar. Selain itu, BNN juga mendektesi laboratorium produksi sabu di Penjaringan, Jakarta Utara pada 10 Maret 2021. Suatu rumah yang digunakan untuk lab tersebut mempunyai beberapa alat dan bahan baku sabu seperti fosfor merah, epedrin, soda api, dan methanol. Laboratorium ini mendapatkan perintah dari narapidana binaan suatu

¹³ Ibid, h 47

lapas di Jawa Tengah. Pada 12 Juni 2021, BNN menemukan rumah kontrakan di Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipergunakan sebagai pabrik produksi pil Y (Trihexyphenidyl) yang merupakan narkoba golongan IV.¹⁴ Perkembangan jenis narkoba terus bertambah dan berkembang dengan berbagai cara digunakan untuk menghasilkan narkoba yang banyak diminati oleh masyarakat. Peminatan masyarakat yang banyak menjadikan sebagian besar narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba dan mengalami peningkatan narapidana setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham menyatakan perihal kapasitas untuk jumlah narapidana telah mencapai 107 persen. Kapasitas yang tersedia untuk 130.512 narapidana, tetapi jumlah yang penghuni mencapai 269.775 orang. Dari keterangan angka tersebut, sejumlah 129.820 narapidana kasus narkoba, yang terdiri atas 77.849 bandar dan 51.971 pecandu. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 40.743 tahanan narkoba dan 10.557 tahanan pada triwulan pertama 2021. Dan narapidana narkoba pada tahun 2020 adalah sebanyak 24.130 napi. Pada triwulan 2021 terdapat 7.424 napi narkoba. Survei Prevalensi 2019 mengungkap beberapa penemuan.

Narkoba dan Perkembangannya di Jawa Timur

Narkoba sebagai permasalahan yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Karena masalah narkoba sudah tergolong fenomena global serta dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bagi warga pada penduduk setempat, nasional, regional maupun global. Selain itu kejahatan narkoba juga menyebabkan kerugian yang sangat berdampak yang paling utama dari segi kesehatan, sosial ekonomi dan keamanan yang dapat mengakibatkan memusnahnya penerus negara untuk di waktu yang akan datang. Konsekuensi yang dapat dialami individu yaitu, gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri serta dapat mengakibatkan kematian¹⁵. Sedangkan efek buruk yang diterima oleh keluarga yaitu gangguan keharmonisan, aib, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Untuk konsekuensi

¹⁴ Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan di Indonesia, Kompaspedia, 27 Juni 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pencegahan-pemberantasan-dan-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia> Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB

¹⁵ Nuri Pina dan Oedojo Soedirman, 2015, *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal 172.

dapat terlihat dalam lingkungan masyarakat untuk penyalahgunaan narkoba yaitu mengusik ketertiban, mendapat stigma buruk, menimbulkan keresahan bagi lingkungan sekitar, menimbulkan pergunjungan yang dapat merujuk kepada pertengkaran dengan masyarakat lain. Kejahatan narkoba telah menjadi masalah serius bagi semua negara tak terkecuali Indonesia, juga telah menghadapi ancaman serius terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Menhan menyatakan bahwasannya masalah Narkoba di Indonesia sudah menjadi satu ancaman nyata dan sudah sangat mengkhawatirkan bagi keamanan dan ketahanan Indonesia.

Salah satu provinsi di Indonesia yang juga mengalami masalah serius dalam penyalahgunaan narkoba ini adalah provinsi Jawa Timur. Jawa Timur dengan jumlah kepadatan penduduk yang mencapai 40, 67 juta jiwa dengan luas wilayah yakni 47.803,49 km².¹⁶ Menjadi salah satu Provinsi dengan kasus tertinggi terkait penyalahgunaan Narkoba menurut BNN. Dapat dilihat dari kasus Penyalahgunaan narkoba tahun 2016 berdasarkan Data Kerawanan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2016 Jawa Timur berada di peringkat kedua dengan jumlah penyalahgunaan narkoba sekitar 543.782. Pada tahun 2016 tersebut terungkap bahwa tersangka penyalahgunaan narkoba berkisar umur dibawah 15 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kejadian ini sungguh memprihatinkan karena generasi muda yang seharusnya menjadi generasi pembangun bangsa malah menyia-nyiakan cita-citanya karena tergoda untuk mengkonsumsi barang haram narkoba. Setiap tahun tersangka terkait kasus penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dengan letaknya yang berbatasan dengan Provinsi Bali yang menjadi jalur pintu masuknya narkoba dan merupakan wilayah yang rentan terhadap peredaran gelap narkoba¹⁷. Dimana dari banyaknya kasus peredaran gelap narkoba dari dan ke Jawa Timur, jalur laut merupakan jalur utama yang dijadikan untuk akses keluar masuk narkoba. Untuk melihat banyaknya tersangka kasus narkoba di Jawa Timur. Penulis telah menghimpun data dari BNNP Jawa Timur dalam kurun waktu 2018-2020 BNNP Jawa Timur berhasil diungkapkan dengan kasus tindak pidana Narkoba dengan keseluruhan kasus yaitu:

¹⁶ Dadang Hardiwan, 2020, *BPS: SP 2020 Jumlah Penduduk Jatim 40,67 Juta Jiwa*. Diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp-2020-jumlah-penduduk-jatim-40-67-juta-jiwa> Diakses pada 04 Oktober 2021 pukul 21.43 WIB

¹⁷ PDF PERGUB Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012

No	Tahun Anggaran	Jenis Program/Kegiatan			Persentase
		Target	Jumlah Berkas Kasus P-21	Tersangka	
1	2018	29	66	38	227%
2	2019	25	60	141	240%
3	2020	25	54	68	216%

Dengan barang bukti sitaan sejumlah total periode 2018- 2020 yaitu:

No	Tahun Anggaran	Jenis Barang Bukti Narkotika			
		Ganja	Sabu-sabu	Ekstasi	T. Gorilla
1	2018 (Jan-Nov)	39380	24987,42	13	-
2	2019 (Jan-Des)	3.988,68	70.314,53	1.181	-
3	2020 (Jan-Des)	6886	20083, 45	73	9,79

Barang Bukti Non Narkotika:

No	Tahun Anggaran	Jenis Barang Bukti Non Narkotika						
		Uang	Hp	Mobil	Motor	Tabungan	ATM	Timbangan
1	2018 (Jan-Nov)	65.240.000 Rupiah	46	6	10	-	-	-
2	2019 (Jan-Des)	1884500 Rupiah dan 63 Ringgit	129	8	18	-	-	-
3	2020 (Jan-Des)	23.127.000 Rupiah dan 444 Ringgit	91	7	16	8	31	6

(Sumber: Konferensi Pers Capaian Kinerja Akhir Tahun 2020 BNNP Jawa Timur)

Dari data kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh BNNP Jawa Timur dapat dikatakan bahwasannya selalu terjadi peningkatan kasus tersangka sejak tahun 2018-2020. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Brigjen M Aris Purnomo mengungkapkan bahwa Jawa Timur berada dalam posisi kedua tahanan kasus narkoba tertinggi di Indonesia selepas Sumatra Utara dengan total 1.221 tahanan. Sedangkan total keseluruhan narapidana narkoba Jatim berada pada posisi pertama dengan jumlah 1.019 narapidana¹⁸. Selain itu dari data angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur tahun 2019, sebanyak 2,50 persen atau 1.038.953 masyarakat Jawa Timur pernah mengonsumsi narkoba¹⁹. Sedangkan 1,30 persen atau sekitar 554.108 penduduk Jawa Timur mengonsumsi narkoba dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Untuk rentang usia yang menggunakan narkoba berkisar 17-19 tahun dan untuk pengguna narkoba terbanyak berada pada usia 35-44 tahun.

Dari data yang ada sebagian kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan para remaja SMA sebagai pelaku maupun pengguna. Penyebab atau pengaruh yang berkaitan dengan sikap penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu keterjangkauan narkoba, sikap teman sebaya, dan sosialisasi rekan sebaya²⁰. Remaja merupakan salah satu usia yang rentang dan mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba yang tanpa mereka sadari akan membawa kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Melihat dari fakta yang ada maka perlu dilakukan penyuluhan yang lebih terutama terhadap kaum remaja agar mereka tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu keluarga juga menjadi faktor penting untuk mendidik dan mengawasi putra-putri mereka agar tidak terjerumus kedalam lingkup penyalahgunaan narkoba.

Di era sekarang ini dimana akses telekomunikasi dan transportasi antar negara menjadi lebih mudah. Hal ini juga membuat peredaran narkoba di kalangan masyarakat juga menjadi lebih mudah. Dimana hanya memanfaatkan media sosial untuk menjual ataupun membeli narkoba dari para pengedar. Selain itu dengan mudahnya akses

¹⁸ Dian Kurniawan, 2021, *Jatim Urutan Kedua Kasus Narkoba Terbanyak di Indonesia*. diakses di <https://surabaya.liputan6.com/read/4659406/jatim-urutan-kedua-kasus-narkoba-terbanyak-di-indonesia#:~:text=%22Jatim%20kasus%20narkoba%20terbanyak%20kedua,Utara%20dengan%20jumlah%201.221%20tahanan> Diakses pada pukul 4 Oktober 2021 pukul 21.47 WIB

¹⁹ Ibid

²⁰ Zulfia Mondir dan Rima Diana Nurilla, 2021, *Dimensi Self Efficacy Peer Educator Anti Penyalahgunaan Narkoba di SMA Surabaya Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal 2.

transportasi membuat peredaran narkoba bukan distribusi yang berada di kawasan negara. Tetapi, narkoba dapat dengan mudah didatangkan melalui negara lain dengan berbagai transportasi darat, jalur laut ataupun jalur udara. Di Jawa Timur sendiri banyak ditemukan kasus narkoba dari yang melibatkan jaringan luar negeri. Mereka mendatangkan narkoba dari luar negeri seperti dari Malaysia, China, Taiwan, Iran melalui jalur laut, darat maupun udara. Dari tahun 2018-2020 pihak BNNP Jawa Timur berhasil menangkap kasus narkoba jaringan luar negeri, berikut data yang berhasil dihimpun penulis berdasarkan sumber dari BNNP Jatim:

No.	Tahun	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Barang Bukti Narkotika	TKP	Keterangan
1.	2018	ZA	WNI	Sabu 140 gram	Terminal II Kedatangan Internasional Bandara Juanda	Tersangka membawa narkotika dari Malaysia melalui jalur udara (pesawat udara) dari Malaysia ke Surabaya.
2.	2018	PS	WNI	Sabu 138,2 gram	Terminal II Kedatangan Internasional Bandara Juanda	Tersangka membawa narkotika dari Malaysia melalui jalur udara (pesawat udara) dari Malaysia ke Surabaya.
3.	2018	SR	WNI	Sabu 920,6 gram	Terminal II Kedatangan Internasional Bandara Juanda	Tersangka membawa narkotika dari Malaysia melalui jalur udara (pesawat udara) dari Malaysia ke Surabaya.
4.	2018	CKL	WNA	Sabu 534 gram	Terminal II Kedatangan Internasional Bandara Juanda	Tersangka membawa narkotika dari Malaysia melalui jalur udara (pesawat udara) dari Malaysia ke Surabaya.
5.	2019	AN, ER, HS, WS, FE, IS, HS	WNI	Sabu 18498,16 gram	Kecamatan Sokobanah Kab. Sampang, Kec. Bukit kapur kota Dumai	AN sebagai pengendali dan membeli sabu dari Malaysia
6.	2020	BH	WNI	Sabu 3045 gram	Terminal II Kedatangan Internasional Bandara Juanda	Tersangka membawa narkotika dari Malaysia melalui jalur udara (pesawat udara) dari Malaysia ke Surabaya.

Konsep Human Security

Konsep terkait keamanan manusia (*Human Security*) pertama kali dipublikasikan oleh Mahbub Ul Haq pada tahun 1994 dalam United Nations Human Development Report on Human security²¹. UNDP sendiri mengartikan Human Security dengan 2 arti, yaitu: (1) bebas dari ancaman kekurangan makanan yang mengakibatkan kelaparan, terserang virus penyakit, dan penindasan; (2) mendapat tempat berlindung dari bahaya yang terjadi sewaktu-waktu dan membawa dampak trauma dalam kehidupan sehari-hari. mulai dari

²¹ Dirjosesworo, Soejono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adi Bakti.

tempat kerja, rumah maupun di lingkungan masyarakat²². Pengertian lain terkait Human Security yang diungkapkan oleh Annan, yakni Human Security memiliki cakupan yang luas sehingga tidak hanya mengenai kekerasan sebagai dampak dari adanya perselisihan. Tetapi juga terpenuhinya Hak Asasi Manusia setiap individu, pengelolaan negara dengan baik, mudahnya mendapat akses pendidikan dan kesehatan bagi semua, dan juga memperhatikan bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam hal menggapai potensi yang dimiliki²³. Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa keamanan manusia tidak hanya memiliki tujuan untuk membebaskan setiap individu dari rasa ketakutan (freedom from fear) tetapi juga bertujuan untuk memenuhi setiap keinginan manusia (freedom from need).

Terdapat empat karakter yang menjadi prioritas utama terkait pentingnya Human Security²⁴, yaitu:

1. Konsep Human Security harus bersifat global: artinya berlakus bagi semua individu, baik yang hidup dinegara maju atau di negara berkembang.
2. Saling bergantung
3. Keamanan manusia (Human Security) dapat terjamin melalui aksi pencegahan dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan manusia itu sendiri daripada melakukan intervensi.
4. Berpusat kepada masyarakat (people centered). Artinya keamanan manusia (Human Security) haruslah konsep yang mementingkan kepentingan manusia yang utama.

Dari keempat karakter yang ada dapat dikatakan bahwa human security ini bersifat universal atau bisa berfungsi untuk seluruh manusia tanpa memandang ras, suku atau agama. Dengan kata lain bisa berlaku secara global.

Pada dasarnya *Human Security* merupakan sebuah konsep yang memfokuskan dalam hal kemanusiaan, sehingga nantinya setiap kebijakan yang ada harus mendukung dan mengikutsertakan masyarakat sebagai badan pendukung dan menginisiasi konsep Human Security yang diinginkan. Jadi jika dipahami lebih lanjut, terdapat 7 komponen

²² Zulfi Mondir, Op. Cit., h. 4

²³ Annan, Kofi. 2000. *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia. Two-Day Session in Ulaanbaatar*, May 8-10,2000.

²⁴ Alkire, Sabina. 2003. *A Conceptual Framework for Human Security, Working Paper 2, CRISE, Queen Elizabeth House, USA: University of Oxford*.

yang diungkapkan oleh *United Nation Development* terkait *Human Security*, yaitu keamanan dalam hal perekonomian, keamanan makanan, keamanan akses kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi setiap individu, keamanan bagi masyarakat, serta keamanan dalam bidang politik²⁵, ketujuh komponen tersebut harus dipenuhi agar dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut terjamin dalam hal *Human Security*. Jadi jika dilihat dari sebuah keamanan suatu negara secara keseluruhan tidak hanya berfokus pada masalah militer saja, namun juga terakait keamanan manusia secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa cakupan Keamanan Manusia (*human security*) lebih banyak daripada ruang lingkup *national security* karena jika *human security* tidak terpenuhi akan dapat menimbulkan berdampak terhadap keamanan seluruh individu.

Oleh karena itu, konsep *Human Security* perlu didefinisikan ulang karena perlu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. *Human Security* dapat menggantikan pemikiran terhadap keamanan kedaulatan negara menuju keamanan manusia (*Human Security*) yang meliputi masalah kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak kelompok masyarakat, minoritas, anak-anak dan perempuan dari kekerasan fisik maupun masalah ekonomi dan politik. terkait masalah keamanan manusia masalah peredaran narkoba masuk dalam ancaman keamanan non-tradisional, yang mana masalah ini menjadi ancaman serius bagi semua negara khususnya Indonesia²⁶. Mulanya Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu Indonesia dijadikan sebagai target peredaran narkoba bagi dari dalam maupun luar negeri. Terkait semakin berkembangnya kasus narkoba di Indonesia sehingga jika tidak cepat ditangani dengan serius akan dapat menjadi ancaman bagi keamanan manusia, terutama dapat mengancam tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

Globalisasi dan Peredaran Narkotika

Globalisasi menurut beberapa pakar ilmuwan diasumsikan sebagai tema yang sering muncul dalam masyarakat saat ini, globalisasi adalah sederhana dan kompleks²⁷.

²⁵ *United Nation Development Program (UNDP), 1993, Human Development Report 1993, New York: Oxford University Press.*

²⁶ Subianto, Landry Haryo (1999). *Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek, Analisis CSIS, Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, Jakarta: CSIS.

²⁷ Jurnal Ahmad, 2005, *Desain Penelitian Analisis Isi*, Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah

Globalisasi telah memperluas dan memfasilitasi tidak hanya pergerakan orang, tetapi juga arus barang, modal, dan jasa. Globalisasi berarti revolusi teknologi yang akibatnya membuat kegiatan transnasional berlangsung lebih cepat, membawa kemudahan serta dan lebih terjangkau dalam hal ekonomi. Pengertian Globalisasi adalah proses berkembangnya interaksi antar masyarakat di dunia global dan akan berdampak kepada orang yang memiliki jarak jauh sekalipun. Arti dari dunia global adalah semua masyarakat dapat memberikan pengaruh satu sama lain, dengan adanya globalisasi maka lintas batas antar negara yang cukup bebas.

Di era modern ini sebagai akibat adanya globalisasi, membuat batas non fisik antar negara semakin sulit untuk dibedakan, dan bahkan lambat laun batas antar negara tersebut memudar (*borderless state*). Walaupun secara nyata batas-batas tersebut menjadi kabur, namun dalam hal yuridiksi tetap tidak berubah. Namun dengan semakin berkembangnya era sekarang, pelaku kejahatan juga ikut mengalami perubahan. Dimana mereka dapat beraksi secara bebas tanpa melihat batas wilayah atau yuridiksi negara lain. Mereka berani mengambil resiko untuk melakukan kejahatan lintas batas negara. disaat era globalisasi baru muncul atau berkembang di masyarakat, lain hal nya dengan modus kejahatan yang telah lama menggunakan konsep globalisasi yang membuatnya tidak harus berhadapan dengan hukum, bahkan di negara lain dengan segalan batasannya dalam hukum justru menjadi senjata perlindungan bagi para pelaku kejahatan²⁸.

Meskipun globalisasi telah menjadi generator utama kemajuan, tidak semua konsekuensinya positif. Terdapat pula dampak negatif dari globalisasi ini dimana kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan narkoba menjadi semakin banyak. Begitupun di Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kasus dalam hal penyalahgunaan dan perdagangan narkoba baik narkoba dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Narkoba dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir transnasional (*TOC*) yang terus mengalami perkembangan terutama di era globalisasi ini. Dengan menawarkan akses teknologi dan telekomunikasi baru dengan memfasilitasi pergerakan bebas orang, globalisasi mendorong aktivitas organisasi kriminal untuk memperluas ke pasar internasional. Asal datangnya barang haram narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari negara lain, yang diselundupkan melalui berbagai jalur yang

²⁸ Subianto, Op.cit., hal 58.

memungkinkan seperti jalur darat, laut maupun udara²⁹.

Biasanya jalur yang banyak digunakan untuk menyelundupkan narkoba dari luar negeri adalah dengan melalui jalur darat dengan melalui daerah sekitar perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Dengan dilatarbelakangi masih kurangnya sistem ataupun aparat penjaga di daerah perbatasan, sehingga hal inilah yang membuat pelaku kejahatan memilih untuk menyelundupkan narkoba dari negara lain melewati wilayah perbatasan. Ditambah lagi dengan imbalan yang besar bagi mereka yang sukses menyelundupkan narkoba melalui perbatasan tanpa diketahui oleh aparat yang berjaga. Membuat mereka mau melakukan pekerjaan ini tanpa memikirkan resiko apabila nantinya mereka tertangkap dan diadili dengan hukum yang ada.

Agar bisa mengelabui aparat keamanan biasanya para pelaku kejahatan menyembunyikan narkoba dengan berbagai cara semisal memasukkannya ke barang lain atau membungkusnya dengan bungkus makanan. Dengan melihat berbagai kasus penyelundupan narkoba dari luar negeri akhirnya menyebabkan Indonesia menderita krisis perdagangan narkoba. Berdasarkan fakta data yang ada, 60-70% narkoba yang diselundupkan dari negara lain ke Indonesia dan sekitar 30-40% narkoba berasal dari dalam negeri dimana utamanya yang banyak beredar adalah narkoba jenis ganja³⁰. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia terkena imbas dampak negatif dari globalisasi. Dimana Indonesia dapat dikatakan sudah kehilangan batas sehingga memudahkan narkoba dari negara lain bebas masuk ke Indonesia.

Pengaruh Teknologi Terhadap Peredaran Narkoba di Jawa Timur

Globalisasi sebagai suatu fenomena yang mempengaruhi segala aspek di bumi, semua memiliki perkembangan dengan mendapatkan dukungan melalui globalisasi. Globalisasi menciptakan efek yang sangat membantu manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Perkembangan globalisasi yang semakin meluas dan menyeluruh di dunia membuat tidak ada batasan bagi negara. Batasan negara baik secara geografis akan memudar seiring perkembangan globalisasi melalui transportasi serta teknologi dan

²⁹ Ibid

³⁰ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transansional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

informasi. Dengan seluruh orang didunia dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa mengenal batas negara maupun waktu.

Dalam lingkup internasional, kemudahan globalisasi membuat negara- negara akan saling ketergantungan. Efek ketergantungan ini memberikan efek yang cukup besar jika negara- negara sangat bergantung pada hubungan yang dimiliki. Tentu saja, negara dengan akan saling terhubung melalui kerjasama ekonomi, politik, budaya, perdagangan hingga investasi yang akan meluas dan mempermudah masyarakat dari negara lain untuk mengetahui budaya dari negara lain. Satu hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi yang dirasakan oleh negara dan dirasakan oleh masyarakat tentang kemudahan mereka dalam mengakses informasi dari platform manapun yang membantu mereka mendapatkan informasi yang diinginkan.

Disisi lain, globalisasi mendapatkan efek negatif seperti perkembangan kejahatan transnasional atau kejahatan terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*) yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat internasional dengan didukung kemajuan segala bidang. Salah satu kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi dimana juga memberikan efek buruk dengan kemudahan mereka untuk saling berkomunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi memberikan dampak buruk terutama dalam kejahatan transnasional dalam narkoba. Penyebaran narkoba yang tiada hentinya dengan pengguna atau pemakai narkoba yang semakin luas dan semakin banyak. Permintaan narkoba yang semakin meningkat dimanfaatkan oleh para sindikat narkoba untuk tetap melakukan perdagangan bebas narkoba dengan perkembangan modus yang mengikuti arus globalisasi sehingga kegiatan transaksi narkoba tidak mencurigakan untuk sebagian orang atau disekitar orang tersebut.

Kemudahan dalam komunikasi membuat peluang bagi para pengedar untuk tetap berkomunikasi dengan para sindikat dan para bandar narkoba (Mafia) dan mereka dapat lolos atau mendapatkan informasi sehingga mereka dapat saling terhubung dengan posisi lintas negara serta mereka dapat melakukan komunikasi dengan bandar narkoba lainnya. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang memberikan kecepatan dalam berkomunikasi sehingga peredaran narkotika semakin cepat dalam melakukan pengedaran narkoba hingga lintas negara. Melalui penggunaan teknologi komunikasi yang dimiliki oleh semua orang memberikan keuntungan bagi para pengedar untuk tetap

berkomunikasi, seperti pada kasus yang telah ditemukan oleh BNNP Jawa Timur yakni pada tahun 2018 terdapat 3 WNI dan 1 WNA yang tertangkap di Bandara Udara Surabaya sedang membawa narkoba dari wilayah Malaysia menuju Indonesia.³¹

Dari kasus yang telah ditemukan, dapat terlihat jelas bahwa kemajuan globalisasi memberikan pengaruh terhadap kemajuan transportasi dan teknologi. Kemajuan globalisasi ini juga menyebabkan pengaruh gaya hidup seseorang berubah mengikuti trend atau arus globalisasi seperti kebutuhan narkoba yang hanya dibutuhkan untuk kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi, dengan didukung oleh globalisasi penyalahgunaan obat- obat terlarang mendapatkan respon positif dari masyarakat sehingga dimanfaatkan menjadikan peluang sebagai bisnis yang sangat menguntungkan dengan memperluas wilayah hingga jaringan bisnis narkoba yang membuat para pelaku tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dari kasus lain juga terjadi yang telah ditemukan oleh BNNP Jawa Timur terkait peredaran jaringan narkoba internasional salah satunya pada tahun 2019 tersangka berinisial AN, HS, ER, WS, FE, IS yang mana mereka tertangkap sedang membawa narkoba jenis sabu pada jalur darat.³²

Dapat diketahui bahwa tersangka AN sebagai pengendali dan pembeli sabu dari Malaysia dan memiliki rencana akan diperjualbelikan di Indonesia. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh globalisasi sangat kuat sehingga mempermudah dalam mengakses transportasi dan komunikasi sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku terutama sindikat kejahatan transnasional untuk melalui batas- batas negara yang dapat memudar akibat globalisasi yakni dengan keberhasilan tersangka mengetahui sistem dari keamanan yang ada pada jalur darat dan pada akhirnya mereka tertangkap oleh pihak BNNP Jawa Timur.

Dampak Perkembangan Narkoba Terhadap Keamanan Manusia

Secara umum, perkembangan narkoba dibagi menjadi tiga tahapan yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah: produksi gelap narkoba, perdagangan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Dari ketiga hal tersebut karena mereka yang terkait maka ini

³¹ BNNP Jawa Timur. Data Kasus Narkoba Jaringan Luar Negeri tahun 2018- 2020

³² Ibid

akan menjadi ancaman multi-dimensi³³. Multidimensi berarti ancaman yang berpotensi untuk mengancam kehidupan setiap individu di berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Dari empat aspek tersebut, merupakan aspek yang sangat penting dan membawa dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Berikut akan terdapat penjelasan dari dampak dari perkembangan narkoba kedalam empat aspek bidang kehidupan seseorang:

Dampak Perkembangan Narkoba dalam Dimensi Politik

Ancaman terhadap dimensi politik merupakan ancaman yang sangat mengkhawatirkan karena ancaman ini dapat mengancam kedaulatan negara. Ancaman ini terjadi ketika narkoba tersebut telah mampu melewati batas negara lain seperti produksi narkoba yang kemudian hasil dari produksi narkoba tersebut sampai pada negara lain bahkan negara yang belum pernah mengenal bahaya narkoba di masyarakatnya. Para pengedar atau sindikat dapat menjangkau hal tersebut ketika mereka melihat potensi bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan kondisi negara yang lemah terhadap perbatasan negara serta adanya konflik dan hukum di sebuah negara dan beberapa kelemahan internal lainnya terutama dalam negara berkembang (*developing countries*).

Disisi lain, kemudahan mereka menjangkau negara lain untuk mengedarkan narkoba tidak lepas dari pengaruh orang-orang dari negara tersebut dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan secara finansial. Dengan sistem tersebut peredaran narkoba akan dilakukan secara terorganisir. Melalui keuntungan finansial dari kegiatan bisnis narkoba tersebut dapat mempermaikan kekuasaan dan otoritas yang menguntungkan bagi mereka sehingga para pebisnis narkoba dapat menciptakan suatu keadaan yang sangat strategis pada sebuah lembaga negara.

Keterlibatan para orang-orang politik terhadap suatu penyebaran narkotika di negara mereka akan menyebabkan tindakan lainnya seperti melakukan tindakan korupsi dengan pejabat yang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis narkoba tersebut. Sehingga dalam hal akan mendapatkan simbiosis mutualisme dimana

³³ Tobing, Fredy B.I. (2002). *Aktifitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara*. Jurnal Global Politik Internasional, Vol 5 No. 1 November.

pejabat akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan pejabat pemerintah tidak fokus pada tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan. Dalam keadaan ini dapat dilihat bahwa sulitnya untuk meningkatkan keamanan masyarakat dari pengaruh narkoba dan memberantas produksi narkoba yang diproduksi di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh aparat negara sehingga dalam hal ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Kegagalan ini menjadikan upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* terhambat dengan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan narkoba dapat menjadi ancaman dalam kehidupan manusia khususnya dalam dimensi politik. pada saat yang sama, negara dengan bentuk pemerintahan dan sistem yang demokratis maka diperlukan banyak biaya untuk mendukungnya agar bisa mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kartel narkoba dapat mendukung secara finansial dengan kartel narkoba akan membutuhkan perlindungan dari elit politik dan setiap kebijakan yang dimiliki pemerintah akan mendapatkan dukungan dari kartel narkoba dengan kebijakan tersebut menguntungkan para pebisnis narkoba.

Dampak Perkembangan Narkoba Terhadap Dimensi Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan sekaligus permasalahan bagi setiap orang. Ekonomi dapat membantu kebutuhan manusia terpenuhi sebagaimana mestinya. Tetapi, dapat menjadi konflik disaat bersamaan dengan terhambatnya seseorang untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi dalam memenuhi kehidupannya. Tingkat perekonomian yang rendah menjadikan konflik bagi mereka dan menjadi peluang bagi para kartel narkoba dengan memberikan upah yang cukup besar bagi mereka. Dengan melaksanakan sebagai kurir narkoba dengan memerlukan kehati-hatian serta kewaspadaan untuk tetap terjaga narkoba tersebut kepada pengguna sehingga bagi mereka pengedaran narkoba dapat menjadi sumber mata pencaharian mereka tanpa mengetahui bahwa kegiatan tersebut dapat melanggar hukum Indonesia. Disisi lain peredaran narkoba dapat menimbulkan kejahatan lainnya yaitu pencucian uang (*Money Laundering*) yang akan berdampak pada kekuatan ekonomi serta mata uang dalam negeri.

Dikutip dari pemaparan *International Monetary Fund (IMF)* pencucian uang atau

Money Laundering ini memiliki pengaruh dalam hal perekonomian, yakni³⁴:

- a. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan ekonomi karena didasari pada kesalahan kebijakan ekonomi makro atau statistik karena pencucian uang.
- b. Perubahan yang sering dalam nilai tukar dan suku bunga karena *cross border* transfer dari biaya yang tidak terduga.
- c. Efek negatif pada pemungutan pajak dan alokasi pengeluaran umum dan barang-barang pencucian uang
- d. Efek kontaminasi kepada transaksi legal karena kemungkinan memiliki keterkaitan dengan kejahatan.

Setelah pemaparan bahwa dampak ekonomi terhadap negara melalui *Money Laundering* memberikan dampak yang sangat besar bagi nilai tukar mata uang sebuah negara. Sehingga dalam mengatasi ini pemerintah perlu untuk memberikan dana yang besar untuk kegiatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta pencegahan. Dengan begitu, kejadian nilai mata uang yang turun akibat peredaran narkoba yang semakin luas dapat diatasi secara bertahap melalui bawah yaitu dengan peningkatan pelayanan rehabilitasi serta beberapa tindakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan hingga dampaknya bagi sebuah negara.

Dampak Perkembangan Narkoba Terhadap Dimensi Sosial Budaya

Peningkatan kasus perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak buruk serta menyerang generasi muda bangsa ini. Penggunaan narkoba bagi generasi muda sangatlah mengancam kehidupan mereka melalui sikap yang berubah menjadi antisosial, melanggar aturan yang ada, kurang memahami rasa budaya nasional disekitar mereka, serta berkurangnya pemahaman tentang negara. Tingginya efek yang ditimbulkan pada pengguna narkoba generasi muda dapat merusak kualitas yang dibangun oleh negara untuk memberikan fasilitas dalam mengembangkan bakat mereka.

Dalam lingkup lain, narkoba dapat memberikan inspirasi pada setiap seniman sehingga dapat menambah imajinasi mereka yang dapat dituangkan dalam karya seninya. Dampak lain juga mempengaruhi pergaulan, narkoba akan menjadi pintu masuk bagi

³⁴ Badan Narkotika Nasional RI. 2009. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: BNN

seseorang untuk masuk dalam pergaulan bebas yang dapat merusak moralitas generasi penerus bangsa. Dengan berbagai alasan yang digunakan untuk mendapatkan serta mengkonsumsi narkoba menyebabkan peningkatan dalam kriminalitas narkoba. Sehingga dapat mempengaruhi tingginya kriminalitas narkoba yang dapat menjadi ancaman bagi sekitarnya.

Dampak Perkembangan Narkoba Terhadap Dimensi Kesehatan

Penggunaan narkoba secara berkelanjutan akan membawa banyak dampak negatif untuk pengguna terutama dalam segi kesehatan. Dengan dosis obat- obat terlarang dapat menurunkan fungsi serta kinerja organ tubuh manusia yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketergantungan narkotika juga menyebabkan kesehatan mental yang akan terganggu yang dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh pengguna. Hal ini meruakan efek yang disebabkan zat narkoba yang mengganggu sinyal syaraf atau dalam dunia medis disebut sistem neurontransmitter yang ada di dalam susunan organ otak. Dengan adanya gangguan neurotransmitter akan berdampak pada: a) fungsi kognitif (daya berfikir dan ingatan); b) fungsi afektif (mengontrol emosi); c) psikomotorik (gerak); d) lama kelamaan akan mengganggu organ dalam seperti kelainan pada organ paru-paru, lever, jantung, ginjal serta komplikasi lainnya³⁵.

Upaya Pemerintah dalam mencegah narkoba

Dengan melihat fakta bahwa dari tahun ketahun kasus narkoba mengalami peningkatan maka diperlukan upaya pemerintah Jawa Timur untuk segera bertindak agar kasus penyalahgunaan narkotika ini dapat dikendalikan dengan cepat. Untuk merespon terkait kasus penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur yang semakin meningkat maka pemerintah Surabaya membuat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Surabaya dalam periode Tahun 2014-2015³⁶. Dengan adanya Perwali ini dapat

³⁵ Adam Sumarlin. 2012. *Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health and Sport, e-jurnal.ung.ac.id, Vol. 5, No. 2

³⁶ PDF PERGUB Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012, Op.Cit., hal 15

dijadikan sebagai panduan bagi pihak terkait untuk menyusun rencana aksi daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk sinergi antar lembaga daerah yang berbeda dalam menyelaraskan rencana dan kegiatan dengan upaya yang ditargetkan. Dalam Pewali tersebut terdapat program pemberdayaan dari P4GN ini yakni memberdayakan masyarakat untuk memantau pergerakan bahan obat terlarang (narkoba), menyebarluaskan informasi publik tentang jenis narkoba dan dampak penggunaannya, dan memberdayakan masyarakat sebagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran program pemberdayaan ini adalah agar 80% masyarakat dapat berperan aktif dalam penerapan program P4GN. Seperti yang sudah ditulis dalam Perwali tahun 2014-2015 pengertian dari P4GN sendiri adalah program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, yang mana sasaran utamanya yakni mampu secara sadar menggunakan segala potensi yang ada untuk memerangi atau menolak penggunaan dan peredaran gelap narkotika di seluruh lapisan masyarakat. Selain menghindari bahaya penyalahgunaan NAPZA, program P4GN meliputi upaya penegakan hukum dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Penerapan P4GN di BNN Provinsi Jatim juga diterapkan guna mengurangi masalah penyalahgunaan narkoba para remaja.

Terkait dengan hal ini BNNP JATIM juga turut andil dalam menerapkan program P4GN dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur. sebagai badan yang dibentuk menangani masalah narkotika di Jawa Timur. BNN Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab lebih dalam hal mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Timur³⁷. Cara yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur adalah dengan menerapkan kebijakan P4GN ini secara aktif dengan harapan bahwa masalah terkait narkotika ini dapat dengan cepat tertangani dan dapat dikendalikan agar tidak berkembang secara terus-menerus. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pihak BNNP Jawa Timur memiliki beberapa program diantaranya adalah BNNP Jawa Timur aktif dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi khususnya kepada lingkungan pendidikan untuk mengingatkan dampak atau bahaya dari narkoba. Serta membentuk kader-kader remaja, Duta narkoba yang anti

³⁷ Daniar Rizky Utami, *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal 4

narkoba yang juga nantinya akan ikut serta dalam menyebarkan pentingnya menjauhi narkoba di kalangan remaja. Selain itu pihak BNNP Jawa Timur juga aktif dalam mensosialisasikan program P4GN untuk semua lapisan masyarakat atau memanfaatkan penggunaan media sosial yang ada seperti instagram, youtube ataupun Tik tok. Penyebaran informasi tentang P4GN ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pengetahuan, memiliki kesadaran dan akhirnya memiliki pola pemikiran untuk tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba. Dengan adanya kabar atau berita terkait P4GN ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Program P4GN lain yang dikembangkan oleh BNNP Jawa Timur adalah memperkuat daerah/lingkungan yang rawan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, selain itu pihak BNNP Jawa Timur juga membantu agar para mantan narapidana pencandu narkoba dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan bisa berbaur serta dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam hal pengenalan program P4GN tidaklah cukup. Diperlukan ketegasan dalam bidang hukum untuk tersangka kasus penyalahgunaan Narkoba. Dimana selaku aparat pihak BNNP Jawa Timur harus memiliki ketegasan dalam hal penegakan hukum sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan pelaku yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba dapat diusut dan diberikan hukuman yang sepantasnya sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat.

BNNP Jawa Timur sebagai leading sector masalah P4GN, pihak BNNP Jawa Timur memiliki program yang mulai dikembangkan lagi di tahun 2021 ini yakni program Desa dan Kelurahan Bersinar (Desa Bersih Narkoba) untuk mengantisipasi wilayah di Jawa Timur yang berpotensi untuk menjadi tempat penggunaan atau peredaran gelap narkoba. Dilansir dari media sosial BNNP Jawa Timur yang dimaksud dengan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) merupakan Kelurahan/Unit Daerah di tingkat desa yang memiliki kriteria untuk dilaksanakannya program P4GN secara masif. Tujuan dari Desa Bersinar ini adalah menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa sehingga bersih dari penyalahgunaan narkoba. Program ini melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaannya sehingga masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menghindari penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa aktivitas yang bisa diikuti masyarakat dalam mewujudkan Desa Bersinar ini diantaranya menjadi Relawan Anti Narkoba, melakukan

KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), untuk sekolah bisa membuat sekolah bersinar. Program ini dimulai dengan desa ataupun daerah yang cukup rawan terkait penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Terdapat beberapa tahapan untuk sebuah desa menjadi Desa Bersinar yakni:

- ❖ Membangun komitmen untuk serius menerapkan Desa Bersinar untuk sebuah desa.
- ❖ Memilih desa yang berpotensi untuk menjadi kandidat Desa Bersinar.
- ❖ Menetapkan desa yang terpilih untuk diselenggarakan program Desa Bersinar.
- ❖ Membuat kelompok untuk berperan dalam program Desa Bersinar
- ❖ Menetapkan anggaran dalam hal ini prinsip mekanisme penganggaran desa bersinar menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kepedulian tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- ❖ Perencanaan P4GN di desa.
- ❖ Perencanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Dimana dalam tahapan ini Pemda bersama-sama dengan BNN Kota/Kab dan tim polda dapat mengusulkan kepada perangkat desa untuk menetapkan Desa Bersinar.
- ❖ Implementasi Program dan Kegiatan. Setelah seluruh tahapan pemilihan Desa Bersinar diatas, maka tahap selanjutnya adalah Implementasi program-program yang telah dibuat dan disepakati terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, jumlah Desa Bersinar yang telah terbentuk di wilayah Jawa Timur berkisar 19 desa³⁸. Untuk tahun 2021 BNNP Jawa Timur memiliki target 35 desa kelurahan yang ada di Jawa Timur yang bisa menjadi desa bersinar. Selain melibatkan masyarakat, BNNP Jawa Timur juga mengikutsertakan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi untuk turut andil dalam mewujudkan program Desa Bersinar ini. Diharapkan dengan adanya mahasiswa sebagai generasi milenial ini dapat membawa ide-ide baru dan kreatif agar program desa bersinar bisa sukses diterapkan di desa ataupun kelurahan di Jawa Timur.

³⁸ 2021, *Ketua DPRD Dukung Pembentukan Desa Bersinar Narkoba di Jatim*. Diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ketua-dprd-dukung-pembentukan-desa-bersinar-narkoba-di-jatim> Diakses pada 04 Oktober 2021 pukul 22.04 WIB

Kesimpulan

Globalisasi sebagai perkembangan dari kehidupan manusia yang semakin cepat dengan didukung oleh berkembangnya akses teknologi komunikasi dan informasi serta semakin majunya bidang transformasi. Tetapi, dibalik dampak positif globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup manusia saat ini, globalisasi juga memberikan dampak negatif dengan berkembangnya kejahatan lintas batas negara. Wilayah di Asia Tenggara menjadi wilayah yang sering menjadi sasaran dalam melakukan kejahatan transnasional seperti narkoba. Pengaruh globalisasi ini menjadikan batas negara menjadi samar serta didukung dengan jaringan yang saling terhubung dan menjadi sangat luas hingga mengakibatkan interaksi antar individu dengan mudah tanpa melibatkan negara. Dampak di era globalisasi ini menawarkan kemudahan bagi mereka pelaku kejahatan lintas batas negara. Seperti dalam hal penyelundupan narkoba dari negara lain melalui jaringan-jaringan yang sudah banyak berkembang di penjuru dunia.

Keterbukaan globalisasi yang semakin meluas memberikan dampak yang pesat dalam berbagai bidang. Sehingga dampak tersebut terus dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba yang semakin tinggi dan membuat masyarakat harus menghadapi kejahatan transnasional dengan kondisi yang meningkat secara kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut sebagai dari pengaruh negatif globalisasi memberikan masyarakat kebebasan, dan kepuasan dengan banyaknya tindakan kriminalitas yang terjadi menggunakan teknologi yang semakin canggih. Dengan kawasan Asia Tenggara sendiri yang menjadi sasaran terbaik dengan berbagai jenis kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba di wilayah tersebut.

REFERENSI

2021, *Ketua DPRD Dukung Pembentukan Desa Bersinar Narkoba di Jatim*. Diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ketua-dprd-dukung-pembentukan-desa-bersinar-narkoba-di-jatim> Diakses pada 04 Oktober 2021 pukul 22.04 WIB

Adam Sumarlin. 2012. "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat". Jurnal Health and Sport, e-jurnal.ung.ac.id, Vol. 5, No. 2

Alkire, Sabina. 2003. *A Conceptual Framework for Human Security, Working Paper 2, CRISE, Queen Elizabeth House. USA: University of Oxford*

Annan, Kofi. 2000. *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia. Two-Day Session in Ulaanbaatar, May 8-10,2000.*

Badan Narkotika Nasional RI. 2009. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta: BNN

BNNP Jawa Timur. *Data Kasus Narkotika Jaringan Luar Negeri tahun 2018- 2020*

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, (Jakarta: BPFKUL, 1991), hal 15

Dadang Hardiwan, 2020, *BPS: SP 2020 Jumlah Penduduk Jatim 40,67 Juta Jiwa.* Diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp-2020-jumlah-penduduk-jatim-40-67-juta-jiwa> Diakses pada 4 Oktober 2021 pukul 21.43 WIB

Daniar Rizky Utami, *Collaborative Governence Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.* Surabaya: Univeristas Airlangga

Dian Kurniawan, 2021, *Jatim Urutan Kedua Kasus Narkoba Terbanyak di Indonesia.* diakse di <https://surabaya.liputan6.com/read/4659406/jatim-urutan-kedua-kasus-narkoba-terbanyak-di-indonesia#:~:text=%22Jatim%20kasus%20narkoba%20terbanyak%20kedua,Utara%20de ngan%20jumlah%201.221%20tahanan> Diakses pada pukul 04 Oktober 2021 pukul 21.47 WIB

Dirjosesworo, Soejono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adi Bakti

JohnBroome. 2000. *Transnational Crime in The TwentyFirstCentury*

Jurnal Ahmad, 2005, *Desain Penelitian Analisis Isi*, Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah

Jurnal P4GN BNN Tahun 2014-2016

Kementerian Luar Negeri, “Kejahatan Lintas Negara” , Kementerian Luar Negeri, 2019 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara Diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Indonesia: Majalah Interpol, 2007)

Mely Cabalero-Anthony, 2009, “*Challenging change: Non Traditional Security*,

Democracy and Regionalism” dalam Donnald K Emerson *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, ISEAS Publishing, Singapura.

Muhamad Victor Simela. 2015. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat (Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands and West Kalimantan)*

Nuri Pina dan Oedojo Soedirman, 2015, *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal 172.

PDF PERGUB Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012

Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan di Indonesia, Kompaspedia, 27 Juni 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pencegahan-pemberantasan-dan-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>
Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transansional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB Indonesia, 1996)

Subianto, Landry Haryo (1999). *Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek, Analisis CSIS, Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, Jakarta: CSIS

Tobing, Fredy B.I. (2002). *Aktifitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara*. *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol 5 No. 1 November
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

United Nation Development Program (UNDP), 1993, Human Development Report 1993, New York: Oxford University Press.

Zulfia Mondir dan Rima Diana Nurilla, 2021, *Dimensi Self Efficacy Peer Educator Anti Penyalahgunaan Narkoba di SMA Surabaya Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.